

# LAPORAN KEGIATAN

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATTAHUN ANGGARAN 2022

TANGGAL 25 AGUSTUS 2022



TELAH DISAHKAN / DIVERIVIKASI SESUAI DENGAN KETENTUAN	
NAMA	LANGGANIY ARUS. SE
NIP	19701010 128989 2 012
JABATAN	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
TANDA TANGAN	

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kami dapat menyusun buku laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022.

Salah satu tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat adalah Meningkatkan peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik, melaksanakan Pendidikan Politik Masyarakat, Pemantauan Pemilu dan Pilkada serta Monitoring, evaluasi dan pemantauan dinamika politik masyarakat.

Penyusunan laporan ini adalah selain salah satu bentuk tanggung jawab, juga sebagai bentuk pendokumentasian kegiatan yang akan dipergunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi mendatang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan buku laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan kualitas laporan dimasa mendatang. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak baik Masyarakat, ataupun instansi terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Demikian laporan ini dibuat agar dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pangkalan Bun, 26 Agustus 2022

**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**



**GEGER SUHARMONO, SP.,MP.,**  
**NIP.19670410 198803 1 012**



## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan menjadi faktor utama dalam upaya pembangunan Daerah. Seperti halnya Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya untuk menerapkan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab, tepat sasaran, akuntabel, transparan dan legitimasi. Salah satunya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki peranan sangat penting salah satunya menjaga stabilitas wilayah. Seperti halnya pemerintahan umum yang berada ditingkat Daerah salah satu perannya ada di Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas Meningkatkan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

### III. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud :

Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Agustus 2022 Oleh Tim Verifikasi Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan untuk :

- a. Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;
- b. Meringankan beban Partai Politik dalam rangka menuju proses demokrasi yang lebih baik dan bersih dari bentuk-bentuk pelanggaran.

## **2. Tujuan :**

Tujuan Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya :

- a. Memastikan proses pengajuan permohonan, pencairan dan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

## **IV. Unsur Yang Terlibat**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, KPU Kotawaringin Barat, Bagian Hukum Setda Kotawaringin Barat.

## **V. Hasil Yang Dicapai**

Hasil dari Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan Tanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut :

1. Proses Pemeriksaan Berkas Permohonan Bantuan Keuangan Kepada 10 Partai Politik Tahun Anggaran 2022 telah berjalan lancar.
2. Kelengkapan berkas Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik : Golkar, PDI-P, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PPP, PKS, PKB, dan Berkarya telah lengkap.
3. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 25 Agustus 2022 sebagai salah satu syarat pencairan Dana Bantuan Tahun Anggaran 2022.

## **VI. Biaya**

Biaya yang timbul dari Rangkaian Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 25 Agustus 2022 , dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang termang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat nomor DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.00000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022.



## **VII. Penutup**

Demikian laporan Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan Tanggal, 25 Agustus 2022S pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum Atau pun Pilkada Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan lebih lanjut oleh pimpinan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, 25 Agustus 2022

**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**



**GEGER SUHARMONO, SP.,MP.,**  
**NIP.19670410 198803 1 012**



**LAMPIRAN KEGIATAN :**

**ACARA : RAPAT VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**HARI : KAMIS, 25 AGUSTUS 2022**

